

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber - sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Alwi, Husein, 2014).

Menurut Mardiasmo (2002:132), “ pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah”.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Pendapatan asli daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

**1. PAD bersumber dari:**

**a. Pajak daerah**

Menurut Undang –Undang Nomer 34 tahun 2000 tentang pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Suparmoko (1992) pajak merupakan pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk. Sedangkan pajak daerah menurut Mardiasmo (2002) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan langsung yang seimbang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun macam-macam pajak daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari:

- 1) Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel.
- 2) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran.
- 3) Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 4) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- 5) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan c, yaitu pajak atas pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 6) Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- 7) Pajak Air Tanah
- 8) Pajak Sarang Burung wallet

9) Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan

10) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 1 ayat 26 menyebutkan bahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Devas *et.al* (1980:91) mengatakan, retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting, hasil retribusi hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah.

Menurut Munawir (1997) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak akan dikenakan iuran itu.

Definisi retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Lebih lanjut Ciri – ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :

- 1) Retribusi dipungut daerah.
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan daerah.

Retribusi daerah memiliki Sifat – sifat sebagai berikut :

- 1) Adanya timbal balik atau imbalan secara langsung kepada pembayar. Imbalan dari retribusi yang dibayarkan dapat langsung dinikmati oleh pembayar, yaitu berupa pelayanan dari pemda yang memungut retribusi.
- 2) Retribusi dapat dipaksakan. Retribusi dapat dipaksakan bersifat ekonomis, artinya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan atau prestasi dari pemerintah, maka wajib membayar retribusi.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat

menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

## **2. Definisi Pariwisata**

Pada hakekatnya berpariwisata adalah suatu proses perginya seseorang menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Pariwisata berasal dari bahasa Sangsakerta, terdiri dari dua suku kata, yaitu “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali - kali atau berputar – putar, sedangkan wisata berarti perjalanan, bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata “travel” dalam bahasa inggris (Yoeti,1996:112).

Menurut Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan Bab 1 pasal 1 ;dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan

perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Definisi yang luas, pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara dilakukan perorangan maupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Menurut Salah Wahab (Salah,2003) dalam bukunya “Tourism Management” pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Aspek ekonomi pariwisata berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata, seperti usaha perhotelan, transportasi, telekomunikasi, bisnis eceran, dan penyelenggaraan paket pariwisata (Gamal 1997).

Dalam pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yang mau tidak mau harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor yang dimaksud menurut Yoeti, (1995 : 109) antara lain:

- a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu.
- b. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain.

- c. Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi.
- d. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.

### **3. Jenis Pariwisata**

Beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal, antara lain (dalam Pendit, 1994 : 41):

- a. Wisata Budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni mereka.
- b. Wisata Kesehatan, yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani.
- c. Wisata Olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara.



- d. Wisata Komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.
- e. Wisata Industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.
- f. Wisata Maritim atau Bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan olahraga air, seperti danau pantai atau laut.
- g. Wisata Cagar Alam, yaitu jenis wisata yang biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.
- h. Wisata Bulan Madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan merpati, pengantin baru, yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.

#### **4. Pendapatan Pariwisata**

Pendapatan pariwisata adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari kegiatan kepariwisataan, Pendapatan daerah dari sektor pariwisata

terdiri dari pungutan pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Menurut *Peta Aksesibilitas dan Profil Kepariwisata Jawa Tengah* (2007) yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah, yang termasuk dalam pendapatan pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh melalui:

a. Pajak hotel

Pungutan wajib yang di bebaskan kepada tiap-tiap hotel yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.

b. Pajak restoran

Pungutan wajib pajak yang dibebankan kepada setiap restoran yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

c. Pajak hiburan

Pungutan wajib yang dibebankan kepada tiap-tiap tempat hiburan yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

d. Retribusi kios

Pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin menepati kios disuatu tempat tertentu.

e. Retribusi kamar kecil

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas kamar kecil di obyek wisata.

f. Retribusi iklan

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan berpromosi atas suatu produk tertentu.

g. Karcis masuk obyek wisata

Pungutan yang dikenakan kepada pengunjung yang masuk ke dalam suatu obyek wisata tertentu.

h. Retribusi parkir obyek wisata

i. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum untuk memarkir kendaraan.

j. Pajak pembangunan 1

Pungutan wajib yang diberikan kepada tiap-tiap hotel dan restoran yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.

k. Penerimaan dari dinas pariwisata setempat

Penerimaan daerah yang didapat dari dinas pariwisata.

**5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata**

**a) Jumlah Wisatawan**

Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Jadi menurut pengertian tersebut, semua orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan “wisatawan”. Apapun tujuannya yang penting perjalanan itu bukan untuk menetap (tinggal) dan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi.

Spillane (1987:27) membagi kategori wisatawan menjadi wisatawan dan pelancong. Wisatawan adalah pengunjung sementara yang tinggal sekurang – kurangnya 24 jam sedangkan pelancong adalah pengunjung yang tinggal kurang dari 24 jam.

Wisatawan dapat dibedakan lagi menjadi:

- 1) Wisatawan Internasional (Mancanegara) adalah orang yang melakukan perjalanan wisata diluar negerinya dan wisatawan didalam negerinya.
- 2) Wisatawan Nasional (Domestic) adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia diluar tempatnya berdomisili, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 24 jam atau menginap kecuali kegiatan yang mendatangkan nafkah ditempat yang dikunjungi.

Defenisi wisatawan menurut Norval (dalam Yoeti, 1995 : 112) adalah setiap orang yang datang dari suatu negara yang alasannya bukan untuk menetap atau bekerja di situ secara teratur, dan yang di negara dimana ia tinggal untuk sementara itu membelanjakan uang yang didapatkannya di lain tempat.

Menurut Yoeti (2008) kedatangan wisatawan mancanegara atau nusantara merupakan sumber penerimaan bagi daerah atau negara, baik dalam bentuk devisa atau penerimaan pajak dan retribusi lainnya, disamping dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Salah satu defenisi yang telah diterima oleh banyak negara ialah defenisi United Nations Convention Concerning Custom Facilities for Touring (dalam Soekadijo, 2000 : 16). Menurut defenisi itu yang disebut wisatawan adalah setiap orang yang datang di sebuah negara karena alasan yang sah, kecuali untuk bermigrasi, dan yang tinggal sedikit-dikitnya selama 24 jam dan selama-lamanya 6 bulan dalam tahun yang sama.

Menurut Cohen (1984) dalam Pitana dan Diarta (2009) suatu destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan dapat dipandang sebagai konsumen sementara. Jika wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut sangat banyak, maka pengeluaran uang untuk membeli berbagai keperluan selama liburannya akan berdampak pada kehidupan ekonomi daerah tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut antara lain :

- a. Dampak terhadap penerimaan devisa negara.
- b. Dampak terhadap pendapatan masyarakat.
- c. Dampak terhadap kesempatan kerja.
- d. Dampak terhadap harga-harga.
- e. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan.
- f. Dampak terhadap kepemilikan dan control.
- g. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya.
- h. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Secara teoritis, semakin banyak jumlah wisatawan dan semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata tersebut (Ida Austriana, 2005). Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan yang diterima oleh pemilik usaha di industri pariwisata dari pembayaran atas pelayanan yang diterima oleh wisatawan yang nantinya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah tujuan wisata setempat yang notabene merupakan komponen dari PAD industri pariwisata. Misalnya, pajak atas pelayanan hotel, restoran, hiburan ataupun retribusi di industri pariwisata. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan ke Kabupaten Banjarnegara, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata.

#### **b) Tingkat Hunian Hotel**

Hotel atau akomodasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kedatangan wisatawan yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut, pendapatan masyarakat,

devisa negara dan lapangan pekerjaan, yang nantinya akan berpengaruh pada sektor lain yang terkait seperti industri/kerajinan rumah tangga, angkutan, komunikasi, pemandu wisata, dan biro perjalanan wisata.

Hotel sendiri secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman, serta fasilitas jasa lainnya di mana semua pelayanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel.

Menurut Sulastiyono (2011:5), hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

Tingkat Hunian Hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual (Vicky, Hanggara 2009). Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut

nyaman untuk disinggahi. Sehingga mereka akan merasa lebih aman, nyaman dan betah untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata. Oleh karena itu industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, baik berbintang maupun melati akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila para wisatawan tersebut semakin lama menginap (Badrudin, 2001). Sehingga dapat memberikan keuntungan yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak hotel.

**c) Rata-Rata Lama Menginap**

Faktor-faktor lama tinggal merupakan salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya penerimaan yang diterima. Secara teoritis, semakin lama seorang wisatawan tinggal di suatu Daerah Tujuan Wisata (DWT), semakin banyak uang yang dibelanjakan di daerah tersebut. Paling sedikit untuk keperluan makan dan minum serta akomodasi hotel selama tinggal disana. Rata-rata Lama Tamu Menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dihuni/dipakai (*bed night used/guest night*) dibagi dengan banyaknya tamu yang datang (*guest of arrived*) (Qorina Novitri dan M. Syafri, 2014).

**6. Dampak Pariwisata**

Pengembangan pariwisata pada dasarnya dapat membawa berbagai manfaat bagi masyarakat di daerah. Seperti diungkapkan oleh Soekadijo (2001) dalam Nasrul (2010), manfaat pariwisata bagi



masyarakat lokal, antara lain: pariwisata memungkinkan adanya kontak antara orang-orang dari bagian-bagian dunia yang paling jauh, dengan berbagai bahasa, ras, kepercayaan, paham, politik, dan tingkat perekonomian. Pariwisata dapat memberikan tempat bagi pengenalan kebudayaan, menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sarana-sarana pariwisata seperti hotel dan perusahaan perjalanan merupakan usaha-usaha yang padat karya, yang membutuhkan jauh lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha lain. Manfaat yang lain adalah pariwisata menyumbang kepada neraca pembayaran, karena wisatawan membelanjakan uang yang diterima di negara yang dikunjunginya. Maka dengan sendirinya penerimaan dari wisatawan mancanegara itu merupakan faktor yang penting agar neraca pembayaran menguntungkan yaitu pemasukan lebih besar dari pengeluaran.

Dampak positif yang langsung diperoleh pemerintah daerah atas pengembangan pariwisata tersebut yakni berupa pajak daerah maupun bukan pajak lainnya. Sektor pariwisata memberikan kontribusi kepada daerah melalui pajak daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah berupa pemberian hak atas tanah pemerintah. Dari pajak daerah sendiri, sektor pariwisata memberikan kontribusi berupa pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak minuman beralkohol serta pajak pemanfaatan air bawah tanah.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Nasrul Qadarrochman (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kota Semarang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dari keempat variabel yang dianalisis yaitu variabel jumlah obyek wisata, variabel jumlah wisatawan dan variabel tingkat hunian hotel dinyatakan signifikan semua, sedangkan variabel pendapatan perkapita dinyatakan tidak signifikan. Hasil output regresi dari F-statistik menyimpulkan bahwa keempat variabel independen yaitu jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan perkapita secara bersama–sama berpengaruh terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Semarang diterima. Sedangkan menurut hasil output regresi dari t-statistik menyimpulkan bahwa variabel yang paling mempengaruhi terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata adalah variabel jumlah obyek wisata dengan t hitung sebesar 4,407 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,001 Nilai koefisien determinasi R-Square ( $R^2$ ) sebesar 0.85 yang berarti 85 persen penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Semarang secara bersama – sama dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan perkapita.
2. Ferry Pleanggra (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, dan Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan*

*Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2006-2010*". Hasil penelitian adalah secara keseluruhan variabel obyek wisata, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata 35 Kabupaten/kota di Jawa tengah.

3. Lia Ardiani Windriyaningrum (2013) melakukan penelitian yang berjudul "*Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, Dan Jumlah Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus*". Hasil dari penelitian ini adalah Perkembangan tingkat hunian hotel selama tahun pengamatan menunjukkan adanya tren yang semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,1%, sedangkan jumlah wisatawan menunjukkan tren yang positif dengan rata-rata pertumbuhan jumlah wisatawan sebesar 12,3%, jumlah obyek wisata menunjukkan adanya peningkatan namun membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk menambah jumlah obyek wisata yang ada. Peningkatan jumlah obyek wisata rata-rata sebesar 10,3%, demikian juga pendapatan daerah sektor pariwisata menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 28,8% selama tahun pengamatan.
4. Riska Arlin (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*". Hasil regresi menunjukkan variabel jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara serta kurs berpengaruh

signifikan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di provinsi DKI, sedangkan variabel investasi dibidang pariwisata dan faktor keamanan tidak berpengaruh signifikan.

5. Betania Pramesti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Pendapatan Perkapita, dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di DIY*". Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Pendapatan Perkapita, dan Investasi yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik dan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu semua variabel independen (Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Pendapatan Perkapita, dan Investasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah).
6. Qorina Novitri dan M.syafri (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "*Determinasi Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kab/KotaProvinsi Jambi*". Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel PDRB sektor pariwisata atas dasar harga konstan, restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Namun pada hasil estimasi menggunakan metode fixed effect jumlah kamar hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Judul	Variabel	Jenis Analisis	Hasil Penelitian
1	Nasrul Qadarrochman, 2010 Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kota Semarang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya	Variabel Dependen: Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Variabel Independen: Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel dan Pendapatan Perkapita	Analisis Regresi linier berganda	Dari keempat variabel yang dianalisis yaitu variabel jumlah obyek wisata, variabel jumlah wisatawan dan variabel tingkat hunian hotel dinyatakan signifikan semua, sedangkan variabel pendapatan perkapita dinyatakan tidak signifikan.
2	Ferry Pleanggra, 2012 Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, dan Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2006-2010	Variabel Dependen: Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Variabel Independen: Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, dan Pendapatan Perkapita	Analisis Regresi linear berganda	Secara keseluruhan variabel obyek wisata, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah.
3	Lia Ardiani Windriyaningrum	Variabel Dependen: Pendapatan Sektor	Analisis Regresi	Berdasarkan uji secara

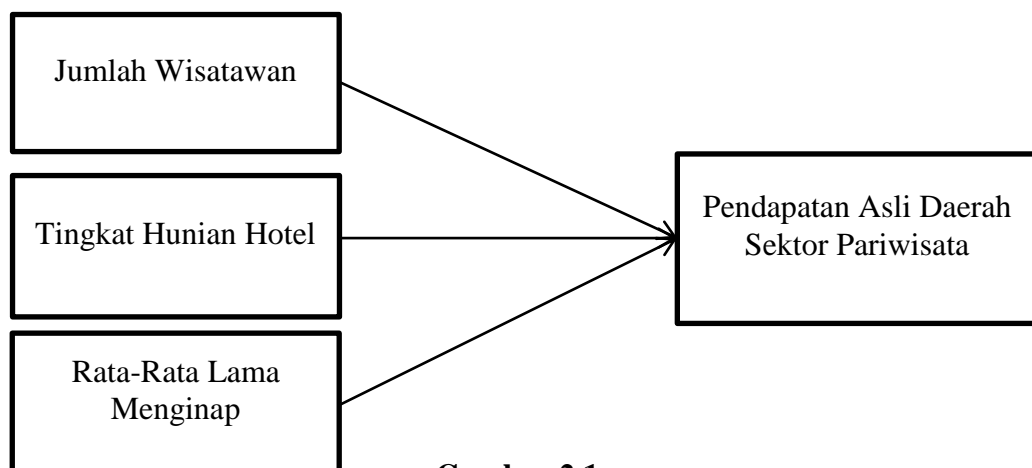
	, 2013 Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, Dan Jumlah Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus Tahun 1981-2011	Pariwisata Variabel Independen: Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata	Linear berganda	bersama-sama menunjukkan bahwa variabel independen tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan dan jumlah obyek wisata secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus.
4	Riska Arlin, 2013 Analisis Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya	Variabel Dependen: Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata Variabel Independen: Jumlah Wisnus dan Wisman, Investasi, Nilai Kurs, dan Faktor Keamanan	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil regresi menunjukkan variabel jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara serta kurs berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di provinsi DKI, sedangkan variabel investasi dan faktor keamanan tidak berpengaruh signifikan.
5	Betania Pramesti, 2014	Variabel Dependen: Pendapatan Asli	Analisis Regresi	Dalam Penelitian ini

	Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Pendapatan Perkapita, dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di DIY	Daerah Variabel Independen: Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Pendapatan Perkapita dan Investasi	Data Panel	semua variabel independen (Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Pendapatan Perkapita, dan Investasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (pendapatan asli daerah) di DIY.
6	Qorina Novitri dan M.syafri, 2014 Determinasi Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kab/Kota Provinsi Jambi	Variabel Dependen: Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Variabel Independen: PDRB sektor pariwisata atas dasar harga konstan, restoran dan rumah makan, dan rata-rata lama menginap	Analisis Regresi Pooling Data atau Data Panel	Berdasarkan nilai probabilitas variabel PDRB sektor pariwisata atas dasar harga konstan, restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Sedangkan hasil estimasi menggunakan metode fixed effect jumlah kamar hotel

				tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata.
--	--	--	--	---

### C. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, dan Rata-rata Lama Menginap terhadap Penerimaan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten banjarnegara. Sehingga diharapkan dapat membantu dalam mengambil solusi maupun kebijakan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Banjarnegara pada masa yang akan datang. Gambar kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Gambar Kerangka Pemikiran**



#### **D. Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga Variabel Jumlah Wisatawan memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.
2. Diduga Variabel Tingkat Hunian Hotel memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.
3. Diduga Variabel Rata-rata Lama Menginap memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.